

PENGARUH *FLYPAPER EFFECT* PADA PAD, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)

Irma Dwi April Rianti

irmadwia23@gmail.com

Kurnia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of flypaper of Local-owned Source Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund on local expenditure. While, flypaper effect is a condition which occurred when local government in funding their local expenditure tends to use more transfer fund of central government than their Local-owned Source Revenue. The research was quantitative. Moreover, the population was districts/cities of East Java province during 2014-2017. Furthermore, the data collection technique used saturated sampling, in which all population used as sample. Additionally, the data were secondary which taken from Central Bureau of Statistics of East Java Province. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 21. The research result concluded as follows (1) Local-owned Source Revenue had positive effect on local expenditure. (2) General Allocation Fund had positive effect on local expenditure. (3) Special Allocation Fund did not effect local expenditure. (4) Flypaper effect was not occurred within districts/cities of East Java province during 2014-2017.

Keywords: flypaper effect, local expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *flypaper effect* pada pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. *Flypaper effect* adalah kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah dalam mendanai belanja daerahnya cenderung lebih banyak menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat daripada menggunakan pendapatan asli daerahnya sendiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh dimana semua populasi dalam penelitian dijadikan sebagai sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. (2) Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. (3) Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. (4) *Flypaper effect* tidak terjadi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2014-2017.

Kata Kunci: *flypaper effect*, belanja daerah

PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia khususnya dalam bidang manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan di Indonesia memasuki era baru yaitu dari pemerintahan yang sentralis berubah menjadi pemerintahan yang desentralisasi seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan yang terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sejak 1 Januari 2001 pemerintah Indonesia telah melaksanakan desentralisasi fiskal. Dengan terlaksananya

desentralisasi fiskal tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan alokasi anggaran secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah yang merupakan perwujudan dari sistem pemerintah yang desentralisasi, Indonesia melaksanakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut, setiap daerah dipacu dan didorong untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pemerintahan (Permana dan Rahardjo, 2013:4).

Otonomi daerah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah, karena setiap daerah dituntut untuk dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat (Inayati dan Setiawan, 2017:221). Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mampu mengatur dan mengelola keuangan daerahnya dalam rangka membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan sarana dan prasarana publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pembiayaan pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap pemerintah daerah memiliki APBD masing-masing, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kota, maupun pemerintah kabupaten (Munir dan Mahdar, 2016:31). Setiap pemerintah daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki, hal ini menyebabkan setiap daerah memiliki jumlah penerimaan pendapatan asli daerah yang berbeda-beda. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan pemerintah daerah yang cakap dalam mengoptimalkan sumber daya alam tersebut tentu akan memiliki jumlah pendapatan asli daerah yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumber daya alam yang sedikit dan pemerintah daerah yang kurang cakap dalam mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia (Paramartha dan Budiasih, 2016:1540). Untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antar daerah, pemerintah pusat setiap tahunnya mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN bagi setiap daerah. Dana perimbangan merupakan wujud komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, dimana dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

Tingkat kebutuhan belanja daerah yang semakin bertambah dapat memberikan kemungkinan bahwa dalam pendanaan belanja daerah, pemerintah daerah tidak dapat mengandalkan pendapatan asli daerah saja sehingga pada akhirnya dana perimbangan dari pemerintah pusat yang berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus akan digunakan sebagai pendanaan belanja daerah. Permasalahan yang muncul ketika pemerintah daerah terlalu bergantung dengan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhan belanja daerah tanpa berusaha untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi serta sumber daya alam yang mereka miliki dapat menyebabkan terjadinya *flypaper effect* (Haryani, 2017:134). *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah mengeluarkan belanja daerah cenderung lebih banyak dengan menggunakan dana perimbangan yang diprosikan dengan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil daripada menggunakan kemampuan sendiri yang diprosikan dengan pendapatan asli daerah (Haryani, 2017:134). Hal tersebut dapat menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja

daerah, atau pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah (Amalia *et al.*, 2015:2). Inayati dan Setiawan (2017) telah menguji apakah terdapat fenomena *Flypaper Effect* terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia dan hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi fenomena *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Indonesia, dikarenakan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia lebih bergantung kepada dana alokasi umum daripada pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah. Hasil penelitian Dewi (2017:172) menyebutkan bahwa *flypaper effect* terjadi pada dana alokasi umum karena semakin besar dana alokasi umum yang di dapat dari pemerintah pusat maka, akan semakin besar pula belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana *grants* atau dana perimbangan untuk pengeluaran atau belanja daerahnya. *Flypaper effect* merupakan sebuah hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah karena kemandirian suatu daerah belum tercipta dan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi. Sementara itu, tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian bagi suatu daerah, yang termasuk didalamnya adalah kemandirian keuangan daerah dalam mendanai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan menyediakan pelayanan publik. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah?; (2) Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah?; (3) Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah?; (4) Apakah terjadi *flypaper effect* pada pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *flypaper effect* pada pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan persetujuan (kontrak) antara dua belah pihak, yaitu pihak pemberi wewenang dengan pihak penerima wewenang (Permana dan Rahardjo, 2013:2). Pihak pemberi wewenang (*principal*) memberikan kewenangan berupa sebuah tanggung jawab kepada pihak penerima wewenang (*agent*) untuk melakukan pengambilan keputusan atas nama pihak pemberi wewenang (*principal*) dimana ketentuan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur ke dalam suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Berkaitan dengan penelitian ini, teori agensi digunakan untuk menggambarkan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta hubungan antara pihak eksekutif (pemerintah daerah) dengan pihak legislatif (DPRD). Sebagai sebuah perwujudan adanya hubungan keagenan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disebut dengan otonomi daerah yang merupakan wujud nyata dalam menjalankan pemerintahan yang desentralisasi. Dalam mewujudkan otonomi daerah pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah tidak terlepas dari pengawasan pemerintah pusat dikarenakan untuk mendukung terlaksananya kemandirian suatu daerah pemerintah pusat setiap tahunnya memberikan dana perimbangan untuk setiap daerah. Hubungan keagenan juga dapat terlihat dari hubungan antara pihak eksekutif (pemerintah daerah) dengan pihak legislatif (DPRD) dikarenakan dalam proses penyusunan anggaran daerah, pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang nantinya akan diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pemeriksaan.

Untuk memastikan bahwa RAPBD yang disusun oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebelum dilakukan pengesahan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pihak legislatif, yaitu DPRD (Amalia *et al.*, 2015:3). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) inilah yang akan dijadikan sebagai indikator oleh pihak legislatif dalam mengawasi kinerja pihak eksekutif.

Otonomi Daerah

Otonomi (*autonomy*) secara etimologi berasal dari bahasa Yunani. *Auto* berarti sendiri dan *nomous* berarti hukum atau peraturan. Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah maksud otonomi daerah (Bastian, 2006:338). Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bersifat luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus menganut empat asas otonomi daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan asas perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah terdiri dari empat aspek utama, yaitu aspek otonomi politik, otonomi hukum, otonomi ekonomi dan otonomi budaya (Bastian, 2006:341). Otonomi politik menyangkut proses pengambilan keputusan politik terutama dalam bidang kepemimpinan daerah. Otonomi hukum menyangkut kewenangan penyusunan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan penyelenggaraan otonomi. Otonomi ekonomi menyangkut kewenangan pengelolaan dan pengalihan sumber daya ekonomi dan keuangan di daerah. Otonomi budaya menyangkut kewenangan dalam hal memelihara tradisi dan kultural di daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Seperti halnya pada pemerintah pusat, pada pemerintah daerah, pengurusan keuangan daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Sehingga pada pemerintah daerah terdapat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dalam pengurusan umum dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus (Halim dan Kusufi, 2012: 21). Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD memuat informasi mengenai program atau kegiatan apa saja yang direncanakan untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bagaimana pembiayaan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan tersebut. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan suatu daerah. Setiap pemerintah daerah memiliki APBD sendiri-sendiri baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kota, maupun pemerintah kabupaten (Munir dan Mahdar, 2016). Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara (Amalia *et al.*, 2015:3). Proses penyusunan APBD menjadi salah satu hal yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah dikarenakan APBD akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah berasal dari sumber ekonomi dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian digunakan untuk mendanai pengeluaran daerah (Mardiasmo, 2013). Pendapatan asli daerah

yang dimiliki oleh suatu daerah tentu akan berbeda-beda tergantung kepada seberapa besar potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah serta kemampuan untuk menggali dan mengelola sumber daya alam tersebut. Sumber utama dalam komponen pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah karena pajak dan retribusi daerah merupakan bagian dari pendapatan yang strategis untuk daerah yang digunakan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan (Haryani, 2017:135). Kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi masing-masing daerah (Kasdy *et al.*, 2018:4). Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah dapat mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah karena semakin besar pendapatan daerah yang dimiliki semakin rendah tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat. Selain dapat menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah, pendapatan asli daerah juga dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan belanja daerah dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga kebutuhan belanja daerah dapat dibiayai oleh pendapatan asli daerah guna menghindari terjadinya *flypaper effect*.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan dana hibah murni (*grants*) dari pemerintah pusat yang kewenangan dalam penggunaan dana tersebut diserahkan penuh kepada pemerintah daerah dengan segala pertimbangan serta sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk digunakan sebagai pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang desentralisasi. Dalam pemberian dana alokasi umum, pemerintah pusat lebih mengutamakan kepada daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah dimana pendapatan asli daerah tersebut belum dapat dikelola dengan maksimal (Prahesti dan Handayani, 2014:10). Penggunaan dana alokasi umum dari pemerintah pusat diprioritaskan untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat (Prahesti dan Handayani, 2014:10). Pemerintah pusat dalam memberikan dana alokasi umum kepada setiap daerah memiliki tujuan utama, yaitu *horizontal equity* dan *sufficiency*. *Horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan suatu daerah adalah kecukupan (*sufficiency*), terutama adalah untuk menutup celah fiskal (Mardiasmo, 2002:157).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat kedalam rencana kerja pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Dalam menetapkan dana alokasi khusus pemerintah menetapkan tiga kriteria, yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Pengalokasian dana alokasi khusus ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Dana alokasi khusus disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari

rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam pemanfaatannya lebih diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal (Permana dan Rahardjo, 2013:2). Oleh sebab itu dana alokasi khusus dicantumkan dalam APBD. Dana alokasi khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas (Haryani, 2017:135).

Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui dapat mengurangi nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja dengan fokus utama pada pencapaian hasil dari jumlah input yang telah direncanakan sebelumnya. Penyusunan belanja daerah lebih diutamakan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi sebuah tanggung jawabnya (Solikin, 2016:16). Belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas (Halim dan Kusufi, 2012:107). Belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari: (1) Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan sehari-hari dan manfaat yang diberikan bersifat jangka pendek; (2) Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi; (3) Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran yang digunakan untuk kegiatan bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti contohnya penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah; (4) Transfer keluar, yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Flypaper Effect

Untuk pertama kalinya pada tahun 1979 istilah *flypaper effect* diperkenalkan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld. Istilah *flypaper effect* digunakan untuk mengartikulasikan pemikiran dari Arthur Okun yang pada tahun 1930 yang menyatakan "*money sticks where it hits*" (Solikin, 2016:13). Namun, sampai saat ini belum terdapat penyepadanan kata dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kata *flypaper effect* dituliskan sebagaimana adanya tanpa diterjemahkan. *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak menggunakan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat daripada menggunakan pendapatan asli daerahnya sehingga dapat menimbulkan sebuah pemborosan dalam belanja daerah (Asriati dan Wahidahwati, 2017:5). *Flypaper effect* muncul sebagai akibat dari adanya penyimpangan dalam teori bantuan pemerintah tak bersyarat bahwa dana transfer dari pemerintah pusat memang meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi ternyata tidak menjadi substitut bagi pajak daerah (Mulya dan Bustaman, 2016:191). Dalam bidang keuangan publik *flypaper effect* menunjukkan bahwa dana hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah meningkatkan pengeluaran masyarakat lokal lebih dari peningkatan pendapatan daerah (Amalia *et al.*, 2015:4). Hal ini dikarenakan apabila dana transfer yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat berjumlah besar maka untuk periode berikutnya pemerintah daerah akan berusaha untuk mendapatkan jumlah dana transfer yang diterima tetap

(Haryani, 2017:134). Sedangkan bagi pemerintah pusat dana transfer diharapkan menjadi pendorong agar pemerintah daerah secara intensif mampu mengoptimalkan penggalian sumber penerimaan potensial daerah sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan (Kurniawan *et al.*, 2019:23). Fenomena *flypaper effect* membawa dampak yang lebih luas bahwa dana transfer dari pemerintah pusat akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada jumlah transfer yang diterima (Prahesti dan Handayani, 2014:12). *Flypaper effect* merupakan sebuah hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah karena kondisi tersebut menunjukkan bahwa daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat dan belum mandiri (Subadriyah dan Hidayat, 2018:192). Sementara, tujuan dari adanya otonomi daerah adalah menciptakan kemandirian bagi suatu daerah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang pemungutannya berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diterapkannya otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan dan keleluasaan dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya sehingga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan belanja daerah. Jika pendapatan asli daerah mengalami peningkatan maka belanja daerah juga akan mengalami sebuah peningkatan, dengan kata lain pendapatan asli daerah mempengaruhi besarnya nilai belanja daerah yang dikeluarkan (Subadriyah dan Hidayat, 2018). Peningkatan belanja daerah tersebut merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdini *et al.*, (2015) menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah dalam pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2009-2013. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Solikin (2016) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah dalam pemerintah daerah di Indonesia periode 2012-2014. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut

H₁ : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Dana alokasi umum merupakan salah satu sumber dalam pembiayaan belanja daerah selain pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk digunakan sebagai pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang desentralisasi. Semakin besar jumlah dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat mengindikasikan bahwa daerah tersebut belum cukup mandiri dan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat masih tinggi. Ciri utama dari dana alokasi umum adalah pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam memanfaatkan dana alokasi umum sesuai dengan pertimbangan yang menjadi prioritas daerahnya (Solikin, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia *et al.*, (2015) menemukan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah dalam pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2009-2013. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Dewi (2017) bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah dalam pemerintah daerah di Indonesia periode 2006-2010. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut

H₂ : Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus merupakan salah satu komponen pendapatan yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan pengeluaran belanja, tetapi untuk kebutuhan yang bersifat khusus guna meningkatkan sarana dan prasarana dasar pelayanan masyarakat yang belum mencapai suatu standar tertentu. Besarnya jumlah dana alokasi khusus yang diterima maka akan meningkatkan jumlah belanja daerah yang dikeluarkan karena dalam mendanai kebutuhan khusus dan sesuai dengan prioritas nasional pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat (Asriati dan Wahidahwati, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Asriati dan Wahidahwati (2017) menemukan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah dalam pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2011-2015. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Kurniawan *et al.*, (2019) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah dalam pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2010-2017. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut

H₃ : Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pengaruh *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembiayaan belanja daerahnya bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, apabila pemerintah daerah terlalu bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat dalam pembiayaan kegiatan belanja daerah yang seharusnya merupakan tugas pemerintah daerah dapat menimbulkan fenomena *flypaper effect*. Besarnya kebutuhan belanja daerah yang semakin meningkat membuat pemerintah daerah tidak dapat hanya mengandalkan pendapatan asli daerahnya dalam mendanai belanja daerah sehingga dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada akhirnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk menutupi kebutuhan belanja daerahnya (Amalia *et al.*, 2015). Respon ketika pemerintah daerah terlalu bergantung dengan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mendanai belanja daerahnya sehingga dapat menimbulkan sebuah pemborosan dapat dikatakan bahwa hal tersebut mencerminkan *flypaper effect*.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahro dan Salisa (2017) menemukan bahwa Pemerintah Kota Se-Eks Karesidenan Pati mengalami *flypaper effect*, dimana pemerintah daerah masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran belanjanya. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Inayati dan Setiawan (2017) menemukan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2009-2013. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut

H₄ : Pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah lebih besar dari pada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah (*flypaper effect*).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Objek dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2017.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sampling jenuh atau sensus, dimana semua anggota populasi akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Peneliti menggunakan sampel jenuh atau sensus dalam penelitian ini, dikarenakan jumlah populasi dalam penelitian ini terbatas sehingga peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, yaitu data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) daerah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan periode tahun 2014-2017. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari subjek atau objek penelitian melainkan dengan menggunakan perantara berupa buku, bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang telah dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada periode tahun anggaran 2014-2017.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber ekonomi asli berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dan pendapatan lain-lain yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mewujudkan tingkat kemandirian suatu daerah pendapatan asli daerah digunakan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Data pendapatan asli daerah dalam penelitian ini diperoleh dari angka realisasi PAD pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014-2017. Rumus yang digunakan untuk menghitung pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk digunakan sebagai pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Data dana alokasi umum dalam penelitian ini diperoleh dari angka realisasi DAU pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014-2017. Rumus yang digunakan untuk menghitung dana alokasi umum menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Data dana alokasi khusus dalam penelitian ini diperoleh dari angka realisasi DAK pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014-2017. Rumus yang digunakan untuk menghitung dana alokasi khusus menurut Peraturan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:

$$\text{DAK} = \text{PU APBD} - \text{BPD}$$

Flypaper effect

Flypaper effect merupakan suatu kondisi dimana pemerintah daerah dalam merespon belanja daerahnya lebih banyak menggunakan dana transfer yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibandingkan dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam menentukan terjadinya *flypaper effect* dilakukan perbandingan antara nilai koefisien pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dengan nilai koefisien dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah dengan syarat, apabila nilai koefisien dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah lebih besar daripada nilai koefisien pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dan ketiganya berpengaruh signifikan atau pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan (Wahyuni dan Supheni, 2017).

Variabel Dependen

Belanja Daerah (BD)

Belanja daerah merupakan semua kewajiban yang diakui dapat mengurangi nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam laporan realisasi anggaran pemerintah periode tahun anggaran 2014-2017. Rumus yang digunakan untuk menghitung belanja daerah menurut Aprilla dan Saputra (2013) adalah sebagai berikut:

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Operasional} + \text{Belanja Modal}$$

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, *variance*, maksimum, minimum, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2018). Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Pengukuran minimum digunakan untuk menghitung jumlah data yang terkecil. Pengukuran maksimum digunakan untuk menghitung jumlah data yang terbesar. Pengukuran mean digunakan untuk menghitung rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk menghitung seberapa besar data yang bervariasi dari data rata-rata.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model dikatakan baik apabila memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan cara menganalisis grafik *Normal Probability (P-Plot of Regression Standardized Residual)*. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila data tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Pengujian statistik juga dilakukan dalam menguji normalitas suatu data. Dalam penelitian ini digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test* untuk menguji normalitas suatu data. Residual berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% (Ghozali, 2018).

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi sebuah korelasi antar variabel bebas. Apabila variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Terjadi multikolinieritas bila nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* lebih besar dari atau sama dengan (\geq) 10 atau nilai toleransi kurang dari atau sama dengan (\leq) 0,10 (Ghozali, 2018).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian data yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi terjadi korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem autokorelasi. Ukuran dalam menemukan problem korelasi dengan menggunakan uji *Durbin Watson (DW)* dengan menggunakan kriteria sebagai berikut (Sunnyoto, 2013):

1. Apabila nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$) maka terdapat autokorelasi positif.
2. Apabila nilai DW berada diantara -2 dan +2 ($-2 < DW < +2$) maka tidak terdapat autokorelasi.
3. Apabila nilai DW diatas 2 ($DW > 2$) maka terdapat autokorelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian data yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas menggunakan metode grafik *scatterplot*, hasil uji statistik yang bebas dari gejala heteroskedastisitas, yaitu jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), terhadap Belanja Daerah (BD). Hubungan antar variabel dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$BD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + e$$

Keterangan:

BD : Belanja daerah
 α : Konstanta
 β : Koefisien regresi
 PAD : Pendapatan asli daerah
 DAU : Dana alokasi umum
 DAK : Dana alokasi khusus
 e : *Error*

Goodness Of Fit

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*-nya. Secara statistik, *Goodness of Fit*-nya dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R^2), nilai statistik f , dan nilai statistik t . Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh model regresi linier berganda menerangkan variabel dependen (terikat) dengan nilai koefisien determinasi diantara nol dan satu. Apabila nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati satu ini berarti bahwa variasi variabel independen (bebas) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen (terikat). Namun, apabila nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati nol atau relatif kecil ini berarti bahwa kemampuan untuk menjelaskan variasi variabel dependen (terikat) sangat terbatas.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat signifikansi model regresi yang digunakan dalam penelitian. Jika angka signifikansi $< (\alpha) 0,05$ maka model regresi yang dihasilkan layak dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Namun jika angka signifikansi $> (\alpha) 0,05$ maka model regresi yang dihasilkan tidak layak untuk digunakan pada analisis selanjutnya.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Dasar yang digunakan adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu apabila angka probabilitas signifikansi lebih dari ($>$) $0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, ini berarti bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara satu variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Begitu juga sebaliknya apabila angka probabilitas signifikansi kurang dari ($<$) $0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).

ANALISIS PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi pada variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan

belanja daerah. Statistik deskriptif masing-masing variabel disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Descriptive Statistic

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	152	77328	5143455	410525,64	666029,951
DAU	152	380780	1709893	924841,91	295069,455
DAK	152	7126	506689	176853,62	131146,181
BD	152	579494	7911563	1842352,55	1069379,862
Valid N (listwise)	152				

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2014-2017

Berdasarkan Tabel 1 dapat diuraikan deskriptif dari masing-masing variabel sebagai berikut : (1) Nilai rata-rata pendapatan asli daerah dari 152 data sampel yang diperoleh menunjukkan penyimpangan data yang tinggi, dikarenakan nilai *standard deviation* yang dihasilkan lebih tinggi daripada *mean*. Nilai rata-rata pendapatan asli daerah yang dihasilkan sebesar 410525,64 lebih kecil dari nilai *standard deviation* sebesar 666029,951; (2) Nilai rata-rata dana alokasi umum dari 152 data sampel yang diperoleh sebesar 924841,91 lebih besar dari nilai standar deviasi data sebesar 295069,455. Hasil ini memperlihatkan data variabel dana alokasi umum mengindikasikan kondisi yang baik (tidak terjadi penyimpangan data); (3) Nilai rata-rata dana alokasi khusus dari 152 data sampel yang diperoleh sebesar 176853,62 lebih besar dari nilai standar deviasi data sebesar 131146,181. Hasil ini memperlihatkan data variabel dana alokasi umum mengindikasikan kondisi yang baik (tidak terjadi penyimpangan data); (4) Nilai rata-rata belanja daerah dari 152 data sampel yang diperoleh sebesar 1842352,55 lebih besar dari nilai standar deviasi data sebesar 1069379,862. Hasil ini memperlihatkan data variabel dana alokasi umum mengindikasikan kondisi yang baik (tidak terjadi penyimpangan data).

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan analisis grafik *Normal P-Plot Regression Standardized Residual* dan pengujian statistik dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test*. Hasil uji normalitas berdasarkan grafik *Normal Probability (P-Plot of Regression Standardized Residual)*, titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mendekati garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal. Berdasarkan uji *Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,202 lebih besar dari 0,05.

Tabel 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		152
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	73.39763090
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.061
Kolmogorov-Smirnov Z		1.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.202

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2014-2017

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi antar variabel bebas. Uji multikolinieritas menunjukkan adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara variabel. Nilai *tolerance* dari semua variabel bebas lebih besar dari 0,10 demikian pula nilai VIF dari semua variabel bebas kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 3
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
1 SQRT_PAD	.786	1.272	Tidak Terjadi Multikolinieritas
SQRT_DAU	.584	1.713	Tidak Terjadi Multikolinieritas
SQRT_DAK	.707	1.414	Tidak Terjadi Multikolinieritas

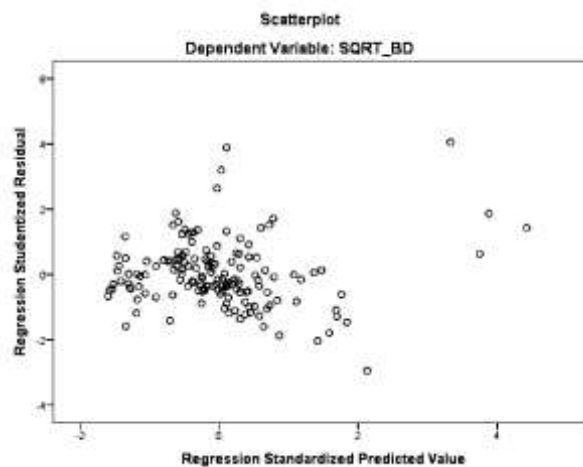
Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2014-2017

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi terjadi korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t - 1$ (periode sebelumnya). Nilai *Durbin-Watson* pada penelitian ini adalah 1.171. Nilai ini terletak diantara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil dari grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sehingga model regresi layak digunakan untuk interpretasi dan analisis lebih lanjut.



Gambar 1
Heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2014-2017

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu Belanja Daerah (BD). Hasil dari analisis regresi berganda dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.768	37.310		.262	.794
SQRT_PAD	.743	.023	.677	32.413	.000
SQRT_DAU	.938	.050	.458	18.907	.000
SQRT_DAK	-.010	.045	-.005	-.221	.826

a. Dependent Variable: SQRT_BD

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2014-2017

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$BD = 9,768 + 0,743PAD + 0,938DAU - 0,010DAK + e$$

Berdasarkan pada model persamaan regresi tersebut di atas, dapat diinterpretasikan, yaitu sebagai berikut: (1) Konstanta (α) yang didapat sebesar 9,768. Hasil ini memperlihatkan bahwa jika variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dianggap konstan atau sama dengan nol (0), maka variabel belanja daerah akan bernilai sebesar 9,768; (2) Nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah yang dihasilkan sebesar 0,743 dan bersifat positif. Hasil ini memperlihatkan adanya hubungan yang searah antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah; (3) Nilai koefisien regresi dana alokasi umum yang dihasilkan sebesar 0,938 dan bersifat positif. Hasil ini memperlihatkan adanya hubungan yang searah antara dana alokasi umum dengan belanja daerah; (4) Nilai koefisien regresi dana alokasi khusus yang dihasilkan sebesar - 0,010 dan bersifat negatif. Hasil ini memperlihatkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara dana alokasi umum dengan belanja daerah.

Goodness Of Fit

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh model regresi linier berganda menerangkan variabel dependen (terikat) dengan nilai koefisien determinasi diantara nol dan satu. Adapun hasil dari uji koefisien determinasi (R²) adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.974 ^a	.949	.948	74.13779

a. Predictors: (Constant), SQRT_DAK, SQRT_PAD, SQRT_DAU

b. Dependent Variable: SQRT_BD

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2014-2017

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa hasil dari uji koefisien determinasi atau R-Square dalam penelitian ini sebesar 0,949 atau 94,9%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari PAD, DAU, dan DAK

dapat menjelaskan model regresi linier berganda sebesar 94,9%. Sedangkan sisanya (100% - 94,9% = 5,1%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model (uji F) digunakan untuk menunjukkan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Adapun hasil dari uji kelayakan model (uji F) adalah sebagai berikut:

Tabel 6
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	15229730.739	3	5076576.913	923.61	.000 ^b
Residual	813469.045	148	5496.412	6	
Total	16043199.785	151			

a. Dependent Variable: SQRT_BD

b. Predictors: (Constant), SQRT_DAK, SQRT_PAD, SQRT_DAU

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2014-2017

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa nilai dari F_{hitung} adalah sebesar 923,616 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk menjelaskan pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen dengan tingkat signifikansi $< 0,05$.

Tabel 7
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.768	37.310		.262	.794
SQRT_PAD	.743	.023	.677	32.413	.000
SQRT_DAU	.938	.050	.458	18.907	.000
SQRT_DAK	-.010	.045	-.005	-.221	.826

a. Dependent Variable: SQRT_BD

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2014-2017

- Uji t antara variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD), dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima, hal ini berarti bahwa variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Hasil uji t ini mendukung hipotesis 1 (H_1) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
- Uji t antara variabel independen Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD), dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima, hal ini berarti bahwa variabel independen Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Hasil uji t ini mendukung hipotesis 2 (H_2) bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
- Uji t antara variabel independen Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah (BD), dengan nilai signifikansi sebesar $0,826 > 0,05$ maka hipotesis ditolak, hal ini berarti bahwa variabel independen Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap

Belanja Daerah (BD). Hasil uji t ini tidak mendukung hipotesis 3 (H_3) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

- d. Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya *flypaper effect* dilakukan dengan cara membandingkan koefisien regresi untuk masing-masing variabel. Dengan syarat terjadinya *flypaper effect* apabila : (1) Nilai koefisien dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah lebih besar dari nilai koefisien pendapatan asli daerah dan ketiganya signifikan, atau (2) Pendapatan asli daerah tidak signifikan. Hasil yang diperoleh adalah nilai koefisien dana alokasi umum adalah sebesar 0,938 dan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan nilai koefisien dana alokasi khusus adalah sebesar -0,010 dan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dari hasil tersebut maka syarat (1) terjadinya *flypaper effect* tidak terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan H_4 dalam penelitian ini ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai uji t sebesar 32,413 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan berarti bahwa H_1 dalam penelitian ini diterima. Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah yang dimiliki, akan semakin meningkatkan belanja daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah juga menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan yang nantinya dapat digunakan sebagai sebuah ukuran kinerja bagi pemerintah daerah dalam proses mewujudkan pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan kemajuan di bidang industri cenderung akan memiliki pendapatan asli daerah yang relatif tinggi. Pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu komponen dalam penerimaan daerah harus selalu ditingkatkan untuk dapat digunakan dalam mendanai kebutuhan belanja daerah dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan sehingga dapat mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Solikin (2016) dalam penelitian tentang Analisis *Flypaper Effect* pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum memiliki nilai uji t sebesar 18,907 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan berarti bahwa H_2 dalam penelitian ini diterima. Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin besar dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat, akan semakin meningkatkan belanja daerah. Dana alokasi umum yang merupakan salah satu komponen dalam sumber pendapatan daerah dapat digunakan dalam membiayai belanja daerah dikarenakan tidak semua beban belanja daerah mampu dibiayai seluruhnya oleh pendapatan asli daerah. Dana alokasi umum memiliki peran untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang didasarkan pada potensi fiskal. Ciri utama dari dana alokasi umum adalah pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam memanfaatkan dana alokasi umum yang diterima dari

pemerintah pusat. Namun, apabila pemerintah daerah menjadikan dana alokasi umum sebagai sumber pendapatan daerah yang utama dan terlalu bergantung pada dana alokasi umum dalam membiayai belanja daerah tanpa berusaha menggali pendanaannya sendiri (pendapatan asli daerah) dapat menyebabkan terjadinya *flypaper effect* yang merupakan konsekuensi dari upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan vertikal.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) dalam penelitian tentang *Flypaper Effect*, PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum memiliki nilai uji t sebesar -0,221 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,826 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah dan berarti bahwa H_3 dalam penelitian ini ditolak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tinggi rendahnya dana alokasi khusus yang diterima oleh pemerintah daerah tidak mempengaruhi tingkat belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi karena dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana transfer pemerintah pusat yang nilainya relatif kecil dan hanya digunakan untuk mendanai kebutuhan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional. Selain itu, agar penggunaan dana alokasi khusus oleh pemerintah daerah sesuai dengan kepentingan nasional, pemerintah pusat mengatur penggunaan dana alokasi khusus melalui berbagai regulasi, seperti peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri teknis berupa petunjuk teknis. Penggunaan dana alokasi khusus lebih diarahkan pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana yang belum mencapai standar tertentu guna meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan daerah. Dana alokasi khusus memiliki peran yang penting dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar di suatu daerah karena sejalan dengan diadakannya otonomi daerah bahwa pemerintah pusat telah melimpahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah sehingga penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat merupakan tanggung jawab bagi pemerintah daerah.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurdini *et al* (2015) dalam penelitian tentang Analisis *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Pengaruh *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2014-2017. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam mendanai belanja daerah lebih banyak menggunakan pendapatan asli daerahnya sendiri dibandingkan dengan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat yang dalam penelitian ini diprosikan dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur telah mampu mengembangkan dan mengelola potensi sumber daya keuangan dari masing-masing daerah. Selain itu, dengan tidak terjadi *flypaper effect* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2014-2017 dapat mencerminkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur cukup mandiri dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat cukup rendah.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mianto (2019) dalam penelitian tentang Pengaruh *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada pendapatan asli daerah dapat dikatakan mampu mempengaruhi peningkatan belanja daerah. Karena pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan utama daerah yang diperoleh dari sumber kekayaan daerahnya sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk mendanai kebutuhan belanja daerah.

Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah maka belanja daerah yang dilakukan juga akan semakin meningkat. Karena dana alokasi umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga dalam pemanfaatan dana alokasi umum pemerintah daerah diberikan wewenang sepenuhnya oleh pemerintah pusat akibat diberlakukannya otonomi daerah.

Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dapat terjadi karena dana alokasi khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang nilainya relatif kecil dan hanya digunakan untuk mendanai kebutuhan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional.

Tidak Terjadi *flypaper effect* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2017. Hal ini berarti pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam merespon belanja daerah tidak bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat yang dalam penelitian ini diprosikan dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan simpulan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) Disarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain yang berpengaruh terhadap belanja daerah seperti, sisa lebih pembiayaan anggaran; (2) Disarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan rentang periode lebih lama dan menggunakan sampel penelitian yang lebih luas, sehingga hasil penelitian yang didapatkan lebih akurat; (3) Disarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data penelitian yang lebih baru, sehingga mungkin akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, W. R., W. Nor, dan M. Nordiansyah. 2015. *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 15(1): 1-12.
- Aprilla, N. dan R. A. Saputra. 2013. Pengaruh *Flypaper Effect*, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi* 3(2): 107-131.
- Asriati, D. dan Wahidahwati. 2017. *Flypaper Effect* pada DAU DAK dan PAD terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(10).
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2014-2015*. BPS Jawa Timur. Surabaya.

- _____. 2017. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2015-2016*. BPS Jawa Timur. Surabaya.
- _____. 2018. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2016-2017*. BPS Jawa Timur. Surabaya.
- _____. 2019. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2017-2018*. BPS Jawa Timur. Surabaya.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Erlangga. Jakarta.
- Dewi, S. R. 2017. Flypaper Effect, PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia. *Journal Of Accounting Science* 1(2): 155-174.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariative Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Kesembilan. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Haryani. 2017. Analisis Flypaper Effect pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 18(2): 133-140.
- Inayati, N. I. dan D. Setiawan. 2017. Fenomena Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 1(2): 220-239.
- Kasdy, L. M., Nadirsyah, dan H. Fahlevi. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4(1): 1-18.
- Kurniawan, R., S. Ratnanto, D. W. Widodo, dan T. D. Santosa. 2019. Analisis Flypaper Effect Dana Transfer dan PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Pendidikan* 6(1): 22-32.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mianto, A. P. 2019. Pengaruh Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Mulya, R. dan Bustaman. 2016. Pengaruh Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1(2): 190-198.
- Munir, M. dan N. M. Mahdar. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi* 3(2): 30-37.
- Nurdini, R., A. Wiratno, dan Y.N. Farida. 2015. Analisis Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2(1): 80-94.
- Paramartha, M. F. dan I. G. A. N. Budiasih. 2016. Analisis *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Khusus Pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 15(2): 1536-1564.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 *Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik*. 13 September 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068. Jakarta.
- Permana, D. Y. dan S. N. Rahardjo. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Diponegoro Journal of Accounting* 2(4): 1-10.

- Prahesti, A. I. dan N. Handayani. 2014. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Bondowoso. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 3(5): 1-20.
- Solikin, A. 2016. Analisis Flypaper Effect pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 16(1): 11-25.
- Subadriyah dan S. Hidayat. 2018. Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Optimum* 8(2): 183-194.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*. Cetakan pertama. Alfabeta. Bandung.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Cetakan kesatu. PT Refika Aditama. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- _____. Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Wahyuni, S. E., dan I. Supheni. 2017. Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2015-2016. *Jurnal Akuntansi Dewantara* 1(2): 188-200.
- Zahroh, A. F. dan N. R. Salisa. 2017. Pengaruh Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Se-Eks Karesidenan Pati. *Accounting Global Journal* 1(1): 106-117.